

# PERAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: Fakta Di Provinsi Lampung

Ahmad Rifa'i

Staff Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Lampung

Email: fai@unila.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to investigate the role of small and medium enterprises (SME's) in regional development in Lampung Province. The tipe of this study is library research. In library research, we are use of results from our researchs in 2006-2009, journals, and textbook. The study show the role of SME's in regional development in Lampung Province is Clasic Theory. In Clasic Theory the role of SME's is decline and substitute with large-size enterprise in regional development.*

*Keywords: SME's, Clasic Theory, and Thesis Flexible Specialization.*

## PENDAHULUAN

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembangunan menurut Tesis *Flexible Specialization* yang mulai berkembang pada dekade 1980-an dinyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya perekonomian nasional (daerah), maka peran (keterlibatan) UMKM dalam perekonomian daerah tersebut akan semakin penting. Argumen utama tesis *flexible specialization* ini adalah UMKM akan berkembang cepat bahkan lebih cepat dari usaha besar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Di negara-negara Eropa Barat dan juga di negara maju seperti Jepang, Swedia, dan AS maka UMKM khususnya di sub-sektor elektronik dan otomotif merupakan salah satu sumber penemuan (*invention*), inovasi, dan efisiensi. UMKM-UMKM tersebut diketahui memiliki kemampuan untuk bersaing dengan usaha besar dan mampu memperbaiki *posisinya* dalam perekonomian.

Kemunculan Tesis *Flexible Specialization* ini sekaligus "menghapus" Teori Klasik tentang peran UMKM dalam pembangunan yang dimotori oleh Hoselitz (1959) dalam Lundvall (1999) dan Anderson (1982) dalam Tambunan (2006). Teori Klasik tentang peran UMKM dalam pembangunan menyatakan bahwa

seiring dengan berkembangnya perekonomian nasional (daerah), maka peran (keterlibatan) UMKM dalam perekonomian daerah tersebut akan semakin kecil dan tergeser oleh peran usaha besar. Teori ini membagi keterlibatan UMKM dalam pembangunan ke dalam tiga fase, yaitu fase *early stage of industrial development* dimana industri yang terlibat banyak di dominasi oleh industri kerajinan rumah tangga (IKRT ; IRT). Fase kedua dimana usaha kecil dan usaha menengah (*small and medium scale*) banyak bermunculan, berkembang cepat, dan akhirnya menggeser posisi IRT. Fase ketiga yaitu "*later*" *development* dimana perekonomian didominasi oleh usaha besar (*large scale*) dan menggeser peran IRT dan UMKM. Beberapa penelitian seperti dari Snodgrass & Biggs (1996); Biggs & Oppenheim (1986); dan Tambunan (2005) mendukung berlakunya Teori Klasik. Sedangkan penelitian dari Heidenreich (1996) dan Essletzbicher (2003: 753-771) mendukung berlakunya Tesis *Flexible Specialization*.

Peran UMKM dalam pembangunan dapat di lihat dari beberapa indikator. *Pertama*, keterlibatan UMKM terhadap pembentukan pendapatan per kapita. *Kedua*, keterlibatan UMKM dalam pembentukan PDRB. *Ketiga*,

keterlibatan UMKM dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah (*growth*). Dalam kaitan ini dari sisi permintaan (*demand-side effect*) peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi dapat memunculkan dampak positif dan negatif (*positive-negative demand-side effect*) terhadap perkembangan UMKM. Dampak positifnya, seperti dinyatakan Tambunan (1999:36-39) bahwa akibat peningkatan pendapatan perkapita dan PDRB masyarakat, maka permintaan terhadap produk-produk UMKM akan meningkat. Peningkatan permintaan ini akan membuka kesempatan kerja dan peluang untuk membuka/menambah usaha kecil baru. Pengaruh positif ini juga bisa dirasakan oleh UMKM yang bisa memenuhi perubahan selera kebutuhan konsumen kearah mengkonsumsi produk yang lebih *sophisticated* sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Tesis *Flexible Specialization*. Sedangkan dampak negatifnya kenyataan menunjukkan bahwa UMKM adalah industri yang hanya mampu membuat produk yang bersifat *inferior*. Sementara masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih menyukai produk-produk yang lebih *sophisticated* yang biasa dihasilkan oleh usaha menengah/besar. Dengan demikian jika UMKM tidak bisa menghasilkan produk yang lebih *sophisticated* maka akan kalah bersaing dengan usaha menengah/besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Teori Klasik.

Sebaliknya dari sisi penawaran (*supply-side effect*) peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat memunculkan dampak positif dan negatif (*positive-negative supply-side effect*) terhadap perkembangan UMKM. Dampak positifnya, seperti dinyatakan Tambunan (1999:34-39) yaitu jika pendapatan perkapita masyarakat, misalnya di sektor pertanian meningkat

yang mencerminkan produktifitas tenaga kerja di sektor tersebut tinggi, maka suplai tenaga kerja sektor industri kecil akan meningkat. Kondisi ini bisa terjadi karena dengan pendapatan yang tinggi di sektor pertanian maka petani dapat mengurangi sedikit waktu mereka bertani, tanpa merugikan jumlah pendapatan mereka secara berarti, dan oleh karena itu mereka memiliki waktu untuk memproduksi di sektor industri kecil baik sebagai tenaga kerja atau membuka usaha kecil sendiri. Atau dengan kata lain, petani dengan penghasilan tinggi memiliki kesempatan (waktu dan investasi) untuk melakukan kegiatan di luar pertanian dengan membuka usaha kecil sendiri. Dengan demikian terjadi penawaran tenaga kerja dan wira usaha untuk membuka usaha kecil baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Tesis *Flexible Specialization*. Dampak negatifnya adalah jika pendapatan perkapita masyarakat di sektor pertanian atau di industri menengah/besar tersebut tinggi, yang merefleksikan terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik di sektor tersebut, maka suplai tenaga dan wira usaha ke sektor industri kecil akan berkurang. Atau banyak pekerja dan pengusaha berpindah profesi ke sektor pertanian dan industri menengah/besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan mengikuti Teori Klasik.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini berusaha untuk mengetahui bagaimana-nakah peran UMKM dalam pembangunan di Provinsi Lampung? Apakah mengikuti Teori Klasik ataukah mengikuti Tesis *Flexible Specialization*? Apakah peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan investasi berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Lampung?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Klasik Tentang Peran UMKM Dalam Pembangunan

Menurut Tambunan (2005) Teori Klasik pertama kali diperkenalkan oleh Hoselitz (1959) yang melakukan penelitian tentang proses industrialisasi di Jerman. Menurut Hoselitz pada tahap awal pembangunan sektor pengolahan di suatu negara akan didominasi oleh usaha kecil (industri rumah tangga) dan pada tahap selanjutnya banyak didominasi oleh usaha besar. Berdasarkan pemikiran Hoselitz tersebut, Parker (1979) dan Anderson (1982) dalam Tambunan (2005) menyatakan selama proses pembangunan ekonomi, keterlibatan sebuah industri dalam pembangunan jika dilihat dari skala (ukurannya) dapat dibedakan menjadi tiga fase. *Fase pertama*, yaitu pada tahap awal pembangunan (*early stage of industrial development*) dimana perekonomian bercirikan dominasi ekonomi agraris. Pada fase ini industri yang terlibat banyak di dominasi oleh industri kerajinan rumah tangga (IKRT ; IRT) baik dalam hal total output industri maupun total tenaga kerja. Tahap ini merupakan tahap dimulainya industrialisasi dimana IRT hidup berdampingan dengan usaha besar yang terbatas jumlahnya.

*Fase kedua*, yaitu pada tahap pembangunan dimana pendapatan riil per kapita masyarakat lebih besar dari pada pendapatan riil per kapita masyarakat pada fase pertama. Pada fase ini usaha kecil dan usaha menengah (*small and medium scale/UMKM*) banyak bermunculan dan berkembang cepat dan akhirnya menggeser posisi IRT pada beberapa sektor industri. Pergeseran ini dimungkinkan terjadi karena, seperti dikatakan Steel (1979), semakin meluasnya pasar dan meningkatnya jumlah penduduk serta adanya proses urbanisasi. Oleh karena itu beberapa UKM mulai menyewa (meng-*hire*) tenaga kerja dalam melakukan proses produksi.

*Fase ketiga*, yaitu pada tahap pembangunan tingkat lanjut ("*later development*") dimana perekonomian sudah sangat maju. Pada tahap ini perekonomian didominasi oleh usaha besar (*large scale*) dan menggeser peran IRT dan UKM. Fase ini bisa merupakan bagian dari fase kedua, karena industri besar yang ada pada fase ini merupakan industri kecil yang berkembang menjadi besar pada fase ketiga atau mungkin juga benar-benar pelaku usaha besar yang baru (*new entry*).

### Tesis *Flexible Specialization* Tentang Peran UMKM Dalam Pembangunan

Menurut Piore & Sabel (1984) dalam Tambunan (2005) mulai tahun 1980-an muncul sebuah paradigma (*issue*) baru tentang peran UMKM dalam pembangunan yang di sebut *flexible specialization* dan sejak saat itu banyak penelitian dan terbitan mempublikasikan paradigma baru ini. *Flexible specialization* terlahir setelah melalui perdebatan yang panjang tentang bagaimana menginterpretasikan pola (*patterns*) baru yang berkaitan dengan proses produksi yang disebabkan oleh adanya kekuatan globalisasi dan restrukturisasi industri. Karena beberapa penulis menyatakan produksi dunia telah mengalami transformasi dari produksi yang bersifat massal (*mass production/Fordist*) ke produksi yang bersifat khusus (*specialization*). Tesis *Flexible Specialization* merupakan pokok bahasan tentang masalah tersebut secara khusus (tersendiri).

Konsep *flexible specialization* pertama kali diperkenalkan oleh Piore & Sabel (1984) dalam Tambunan (2005) dimana mereka mendiskusikan munculnya kembali industri kerajinan yang mendominasi di beberapa daerah di negara-negara Eropa Barat, yaitu di Italia, Jerman dan Austria. Dalam menguji (meneliti) industri kerajinan di beberapa negara tersebut, Piore & Sabel menyatakan bahwa keberadaan UKM di daerah-daerah tersebut menjadi

kelompok baru yang dominan dalam sebuah organisasi industri. Dalam industri tersebut UKM memiliki ciri-ciri jumlah tenaga kerja yang banyak serta keterampilan pekerja yang beragam dan memiliki fleksibilitas terhadap teknologi yang mutakhir untuk menghasilkan beberapa produk yang khusus (*specialized*) untuk melayani pasar global. Terdapat empat kondisi organisasi yang lazim dari *flexible specialization*, yaitu:

1. *Flexible and specialization*: perusahaan dalam industri (*community*) dapat dengan cepat merubah teknik produksi tetapi dengan tetap melakukan spesialisasi produksi terhadap satu jenis produk tertentu.
2. Jumlah perusahaan terbatas (*limited entry*): perusahaan dalam industri (*community*) merupakan bagian dari komunitas yang membatasi pihak lain (*outsider*) untuk masuk.
3. Tingkat kompetisi inovasi yang tinggi (*high level of competition innovation*): tekanan yang terus menerus terhadap perusahaan dalam industri (*community*) akan mengembangkan inovasi sehingga dapat menghalangi pesaing mereka.
4. Tingkat kerjasama yang tinggi (*high level of co-operation*): adanya persaingan antar perusahaan dalam industri (*community*) tentang upah dan kondisi kerja, akan mendorong kerja sama yang kuat diantara mereka.

Argumen utama Tesis *Flexible Specialization* adalah bahwa UMKM akan berkembang cepat bahkan lebih cepat dari usaha besar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Di negara-negara Eropa Barat, dan juga di negara maju seperti Jepang, Swedia dan AS, UMKM khususnya di sub-sektor elektronik dan otomotif merupakan sumber penemuan (*invention*), inovasi

dan efisiensi. UMKM-UMKM tersebut diketahui memiliki kemampuan untuk bersaing dengan usaha besar dan mampu memperbaiki posisinya dalam perekonomian.

Dalam literatur-literatur tentang *flexible specialization* disebutkan dengan tegas bahwa teknologi dapat megembangkan/memajukan kelangsungan hidup UMKM dan meningkatkan skala ekonomi serta menjadikan UMKM sebagai perusahaan kecil yang bisa menjadi pemimpin ekonomi. Dan juga meningkatkan kemampuan UMKM untuk merespon permintaan pasar yang berubah dengan cepat, menciptakan harga murah, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan peran UKM dalam pembangunan ekonomi (Tambunan, 2005).

### **Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

*Asean Development Bank* (ADB) mendefinisikan industri kecil dengan menitikberatkan pada aspek finansial karena peran lembaga tersebut sebagai penyedia dana bagi usaha. ADB mendefinisikan UMKM adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai kredit yang diperlukan sebesar Rp 50 juta hingga Rp 5 milyar dan mempekerjakan 5 sampai 100 orang. Dari definisi tersebut terlihat bahwa ADB menggunakan istilah kredit untuk menggolongkan jenis suatu usaha, yang berarti aspek finansial yang menjadi penentu penggolongan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, menghasilkan penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain, berbentuk badan usaha perorangan yaitu badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk koperasi. Titik tekan

dari definisi ini adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Badan Pusat Statistik (BPS, 1996) menggolongkan perusahaan/usaha industri pengo-lahan kedalam empat kategori berdasarkan jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanam ataupun kekuatan mesin yang digunakan. Empat kategori tersebut adalah (1) Industri kerajinan rumah tangga (IKRT) dengan pekerja 1-4 orang; (2) Industri kecil (IK) pekerja 5-19 orang; (3) Industri/usaha sedang/menengah (UM) dengan pekerja 20-99 orang; dan (4) Industri/usaha besar (UB) dengan pekerja 100 orang atau lebih.

### **Kajian Peran UMKM Dalam Pembangunan**

**Penelitian Snodgrass & Biggs (1996)** menggunakan sensus industri dari 34 negara di Amerika Latin, Asia, dan AS tahun 1985-1988. Hasil penelitian menunjukkan korelasi negatif antara pembangunan ekonomi dengan peran penting usaha kecil. Hal ini ditandai dengan semakin besar pendapatan riil per kapita negara yang bersangkutan, maka persentase tenaga kerja di usaha kecil semakin kecil. **Penelitian Biggs & Oppenheim (1986)** dilakukan pada sejumlah negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan riil per kapita suatu negara, maka semakin kecil persentase tenaga kerja pada usaha kecil, terutama IRT, dan semakin besar persentase tenaga kerja pada usaha menengah dan usaha besar.

**Penelitian Tambunan (1999)** dilakukan di 9 desa di Kab. Bogor tahun 1984-1993. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi desa (yang di-*proxi* dengan pendapatan riil per kapita), secara relatif semakin sedikit jumlah usaha kecil, terutama IRT di desa tersebut. Namun secara absolut jumlah usaha kecil terus bertambah.

**Penelitian Heidenreich (1996: 401-419)** di lakukan di negara bagian Emilia-Romagna dan Baden-Wurttemberg Eropa tahun 1991-1994. Hasil penelitian menunjukkan kesuksesan ekonomi, yang di tandai dengan nilai GDP yang tinggi, di kedua daerah tersebut dimotori oleh peran usaha kecil (*small and medium enterprises/UMKM*). UMKM-UMKM tersebut terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu dan saling meningkatkan kerjasama (*co-operation*). **Penelitian Essletzbicher (2003: 753-771)** dilakukan pada industri kecil manufaktur di AS. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan sistem produksi dari produksi yang bersifat massal (*mass production/Fordist*) ke model *flexible specialization*. Perubahan ini banyak terjadi pada usaha kecil-usaha kecil (*small firms*) dan mereka membentuk sebuah kerja sama (*networks linked*) untuk meningkatkan daya kompetisi.

### **METODE PENULISAN**

Tujuan penulisan ilmiah ini adalah mengetahui peran UMKM dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Tulisan ini merupakan hasil studi/kajian pustaka baik dari buku-buku yang bersifat *textbook*, jurnal-jurnal ilmiah, dan ringkasan (intisari) hasil-hasil penelitian tentang UMKM yang telah dilakukan penulis selama kurun waktu 2006-2009.

### **PEMBAHASAN**

Berkaitan dengan peran UMKM dalam pembangunan di tingkat Provinsi Lampung, hasil penelitian Rifa'i dkk (2008:48-49) yang dilakukan pada 10 Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2000-2005 menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan di Provinsi

Lampung mengikuti Teori Klasik. Yaitu semakin tinggi tingkat perekonomian di Provinsi Lampung maka peran UMKM tersebut dalam pembangunan semakin kecil. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu *pertama* tidak adanya pengaruh yang signifikan antara peningkatan pendapatan perkapita dengan perkembangan usaha kecil (peningkatan jumlah, investasi, dan tenaga kerja usaha kecil). Keadaan ini berarti kelebihan pendapatan yang dimiliki penduduk sebagai akibat meningkatnya pendapatan tidak digunakan oleh penduduk tersebut misalnya untuk berinvestasi di sektor usaha kecil (sektor informal). Artinya dari segi *supply-side effect* masyarakat memandang bahwa investasi di sektor usaha menengah dan besar dianggap lebih menguntungkan, karena misalnya sektor usaha menengah dan besar lebih menjanjikan tinggi-nya ROI (*return on investment*) maupun ROE (*return on equity*) dibandingkan sektor usaha kecil. Sehingga usaha kecil di Provinsi Lampung tidak berkembang seiring dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Selain itu peningkatan pendapatan perkapita juga akan menimbulkan peluang bagi penduduk yaitu mereka memiliki kesempatan (yaitu kelebihan waktu, tenaga, dan investasi karena mereka telah lebih sejahtera) untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan yang selama ini mereka tekuni, yaitu misalnya dengan membuka usaha kecil sendiri. Namun demikian kelebihan waktu, tenaga, dan investasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh penduduk untuk misalnya membuka usaha kecil tambahan atau bekerja tambahan di sektor usaha kecil. Sedangkan dari sisi *demand-side effect* kelebihan/peningkatan pendapatan yang dialami oleh penduduk digunakan untuk berbelanja ke produk-produk yang lebih *sophisticated* yang umumnya dihasilkan oleh usaha menengah dan besar dibandingkan produk sederhana yang biasanya dihasilkan oleh usaha kecil.

Pada kondisi ini UMKM semakin tidak berkembang dan tidak berperan dalam pembangunan karena tidak dapat memenuhi selera konsumsi masyarakat yang semakin meningkat pendapatannya.

Hasil penelitian Rifa'i dkk (2006:47-52) juga menunjukkan keterlibatan tenaga kerja sektor usaha kecil di Provinsi Lampung tidak dapat berperan secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut. Diharapkan keberadaan pekerja-pekerja di sektor informal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan. Namun kenyataannya semakin banyak tenaga kerja yang ada di sektor usaha kecil ini justru semakin menurunkan pendapatan perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor ini sangat rendah. Artinya meskipun banyak orang yang bekerja di sektor usaha kecil, tetapi keberadaan mereka tidak signifikan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, yaitu yang ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Selain itu hasil penelitian tersebut juga menunjukkan peningkatan jumlah investasi usaha kecil juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Lampung. Kondisi dapat dijelaskan oleh Borenstein et.al (1998) dalam Jalilian & Weiss (2001) yang menyatakan bahwa investasi akan berpengaruh kepada peningkatan *income* perkapita jika investasi tersebut diterapkan pada usaha dimana tenaga kerjanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keahlian (*skill*) yang tinggi. Sebagaimana diketahui karakteristik tenaga kerja UMKM di Indonesia adalah usaha kecil yang mudah untuk dimasuki atau ditinggalkan, tingkat pendidikan pekerja yang rendah (SD), persyaratan ketenagakerjaan yang longgar, dan tenaga kerja yang ada memiliki kemampuan *skill* yang rendah. Hal ini

berarti ketidakmampuan UMKM berperan dalam peningkatan perekonomian di Provinsi Lampung salah satunya disebabkan investasi di sektor ini diterapkan pada tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan *skill* yang rendah.

Gillson & Page (2002) juga menyatakan bahwa investasi pada industri manufaktur di Africa tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin (dalam konteks peningkatan pendapatan) karena rendahnya keterampilan (*skill*) mereka. Namun demikian melalui investasi masyarakat miskin kemungkinan akan mendapatkan pekerjaan. Hasil penelitian Gillson & Page ini sesuai dengan fakta di negara kita bahwa salah satu peran UMKM adalah penghasil (*peng-create*) tenaga kerja namun dengan upah yang rendah. Rendahnya upah ini salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu O'Neill (1995) menyatakan bahwa penerapan investasi dalam rangka mengurangi kemiskinan akan berpengaruh positif dan signifikan jika diterapkan pada tingkat makro. Sedangkan pada tingkat mikro kemungkinan investasi tidak akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Dengan demikian penambahan investasi pada UMKM tidak secara signifikan akan meningkatkan pendapatan orang miskin (mengurangi kemiskinan) dan membantu pembangunan karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja pada UMKM.

Kedua, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara peningkatan PDRB dengan perkembangan usaha kecil (peningkatan jumlah, investasi, dan tenaga kerja usaha kecil). Hal ini berarti semakin makmur maju perekonomian Provinsi Lampung, yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB, tidak memberikan sumbangan yang nyata terhadap perkembangan usaha kecil. Pada kenyataannya peningkatan nilai

PDRB hanya berpengaruh pada naiknya investasi dan naiknya daya serap tenaga kerja di sektor usaha menengah dan besar. Selain itu peningkatan perekonomian Provinsi Lampung, yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai PDRB, juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah unit usaha kecil.

Jika di tinjau dari sisi permintaan (*demand-side effect*) berarti bahwa peningkatan PDRB tidak membuka peluang (secara nyata) bagi usaha kecil untuk berpartisipasi dalam pembentukan nilai PDRB melalui peningkatan nilai investasi untuk berproduksi dan peningkatan keterlibatan tenaga kerja dalam produksi. Dengan kata lain besarnya nilai PDRB Provinsi Lampung berasal dari kontribusi usaha menengah dan besar dan bukan berasal dari kontribusi usaha kecil. Sedangkan dari sisi penawaran (*supply-side effect*) menunjukkan bahwa kemajuan perekonomian di Provinsi Lampung tidak memberikan "tawaran" (yang nyata) kepada usaha kecil untuk meningkatkan investasi dan keterlibatan jumlah tenaga kerja dalam rangka meningkatkan PDRB. Dengan kata lain kemajuan perekonomian hanya membuka (menawarkan) peluang investasi dan ketenagakerjaan bagi usaha menengah dan besar. Kondisi ini mengisyaratkan tenaga kerja yang ada Provinsi Lampung lebih suka bekerja di sektor usaha menengah dan besar. Hal ini kemungkinan disebabkan karena upah tenaga kerja di sektor usaha menengah dan besar lebih tinggi. Kemungkinan lain adalah seperti dinyatakan Tam-bunan (1999) bahwa produktifitas tenaga kerja di sektor pertanian (sektor subsisten) cukup rendah sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk *men-supply* tenaga kerja ke sektor industri. Kondisi ini secara tidak langsung akan berakibat terhadap berkurangnya jumlah unit usaha kecil yang terlibat dalam perekonomian.

Ketiga, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah (*growth*) dengan perkembangan usaha kecil (peningkatan jumlah, investasi, dan tenaga kerja usaha kecil). Hal ini menunjukkan bahwa semakin makmur (maju) pereko-nomian Provinsi Lampung, yang ditandai dengan meningkatnya nilai pertumbuhan ekonomi daerah, maka semakin kecil persentase tenaga kerja dan jumlah unit usaha kecil yang terlibat dalam perekonomian. Dengan kata lain semakin besar persentase tenaga kerja dan jumlah unit usaha menengah dan besar yang terlibat dalam perekonomian.

Jika di tinjau dari sisi permintaan (*demand-side effect*) berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak menimbulkan permintaan konsumsi terhadap produk-produk usaha kecil dan juga tidak menimbulkan permintaan terhadap tenaga kerja dan investasi dalam rangka meningkatkan PDRB yang merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti konsumsi masyarakat cenderung mengarah kepada konsumsi ke produk-produk yang dihasilkan usaha menengah dan besar. Kemajuan perekonomian juga didominasi oleh peran usaha menengah dan besar dalam rangka pembentukan PDRB sebagai komponen dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari sisi penawaran (*supply-side effect*) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah justru menyebabkan tidak adanya *supply* tenaga kerja ke sektor usaha kecil. Dengan kata lain dalam kondisi ekonomi yang sedang tumbuh, masyarakat lebih senang bekerja di sektor usaha menengah dan besar sehingga menyebabkan daya serap tenaga kerja sektor usaha menengah dan besar lebih tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor investasi, dimana pada saat perekonomian sedang tumbuh *supply* investasi dari masyarakat cenderung mengarah ke sektor usaha menengah dan besar. Hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena sektor usaha

menengah dan besar lebih menjanjikan tingginya ROI (*return on invesment*) maupun ROE (*return on equity*) dibandingkan sektor usaha kecil. Karena rendahnya *supply* tenaga kerja dan investasi dari masyarakat terhadap usaha kecil maka menyebabkan turunnya jumlah unit usaha kecil yang terlibat dalam perekonomian.

Untuk peran UMKM dalam pembangunan di tingkat Kab/Kota berdasarkan penelitian Rifa'i dan Aprilani (2006:47-48) menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pembangunan di Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung mengikuti Teori Klasik. Yaitu semakin maju perekonomian di Kab. Lampung Selatan, yang ditandai dengan adanya peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pendapatan perkapita maka semakin kecil peran UMKM dalam perekonomian di Kab. Lampung Selatan. Dari penelitian tersebut dihasilkan temuan bahwa semakin besar pertumbuhann ekonomi Kab. Lampung Selatan justru menyebabkan semakin kecilnya jumlah tenaga kerja dan jumlah unit usaha kecil yang terlibat dalam perekonomian. Selain itu dalam penelitian tersebut juga dihasilkan temuan bahwa dengan semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat di Kab. Lampung Selatan, maka justru menyebabkan semakin kecil jumlah investasi yang ada di sektor usaha kecil. Hal ini dapat berarti bahwa masyarakat lebih menyukai menginvestasikan kelebihan dananya pada sektor usaha menengah dan besar.

Hasil yang sama dalam penelitian Rifa'i dkk (2007:89-97) bahwa bantuan modal/ investasi yang diberikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi pada usaha kecil kerajinan Tapis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pemerintah berharap melalui bantuan modal/investasi ini usaha kecil tersebut dapat lebih berperan dengan meningkatkan jumlah produksi dan efisiensi. Namun jika kenyataanya usaha kecil tersebut tidak bisa efisien



meskipun telah dibantu modal, maka kemungkinan bagi usaha kecil tersebut untuk berperan dalam perekonomian sangat kecil. Karena sebuah unit usaha akan memiliki kontribusi positif dalam perekonomian salah satunya jika dan hanya jika unit usaha dapat bekerja dengan efisien. Jika tidak maka keberadaan unit usaha yang tidak efisien tersebut hanya akan memperlambat gerak maju sebuah perekonomian. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan investasi pada usaha kecil tersebut tidak signifikan adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor usaha kecil, rendahnya *skill* tenaga kerja di sektor usaha kecil, dan kemungkinan terjadinya fenomena "push" dalam perekonomian yaitu tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha kecil terjadi karena "terpaksa" sebagai akibat adanya PHK dan pengangguran.

## **KESIMPULAN**

Peran UMKM di Provinsi Lampung mengikuti Teori Klasik, dimana seiring dengan berkembangannya perekonomian di Provinsi Lampung maka peran (keterlibatan) UMKM dalam perekonomian tersebut akan semakin kecil dan tergeser oleh peran usaha besar. Fakta ini di dukung data bahwa peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM baik dari sisi peningkatan jumlah unit usaha kecil, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha kecil, maupun investasi di usaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biggs, T. and Oppenheim, J. 1986. *What Drives the Size Distribution of Firms in Developing Countries?* EEPA Discussion Paper No. 6 HIID, Harvard University.
- BPS. 1996. *Statistik Industri Kecil: Sensus Ekonomi 1996*. BPS Jakarta
- Essletzbichler, J. 2003. *From Mass Production to Flexible Specialization: The Sectoral and Geographical Work of Contract Work in US Manufacturing, 1963-1997*. *Regional Studies*, 37 (8) pp. 753-771.  
[www.eprints.soton.ac.uk/14801/](http://www.eprints.soton.ac.uk/14801/)
- Gillson, I. and Page, S. 2002. *Trade, Investment and Poverty*. ODI Opinions. Working Paper. [www.odi.org.uk/opinions](http://www.odi.org.uk/opinions)
- Heidenreich, M. 1996. *Beyond Flexible Specialization: The Rearrangement of Regional Production Orders in Emilia-Romagna and Baden-Württemberg*. *European Planning Studies*. Vol. 4/1996, pp. 401-419.  
  
[www.fortunecity.com/victorian/hornnton/117/#FN1](http://www.fortunecity.com/victorian/hornnton/117/#FN1)
- Jalilian, H. and Weiss, J. 2001. *Foreign Direct Investment And Poverty in The Asia Region*. University of Bradford, UK and Asian Development Bank institute. Tokyo. Working Paper. [www.google.com](http://www.google.com)
- Lundvall, K. 1999. *Essays On Manufacturing Production In A Developing Economy: Kenya 1992-94*. Departement Of Economics School Of Economics And Commercial Law Göteborg University. September 1999. Working Paper.  
  
[www.handels.gu.se/epcarchive00/00234301LundvalldissNE.pdf](http://www.handels.gu.se/epcarchive00/00234301LundvalldissNE.pdf)
- O'Neill, Donal. 1995. *Education and Income Growth: Implications for Cross-Country Inequality*. *Journal of Political Economy*. Vol. 103 No. 6. pp 1289-1301.
- Rifa'i, A., Aprilani, D., dan Prasetyo, S. 2006. *Studi Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Hibah Bank Indonesia Bandar Lampung.
- Rifa'i, A dan Aprilani, D. 2006. *Pengaruh Tingkat Kemajuan Daerah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil (Survei pada Usaha Kecil di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1995-2004)*. Laporan Penelitian DIPA PNPB Universitas Lampung 2006.
- Rifa'i, A., Aprilani, D., dan Prasetyo, S. 2007. *Pengaruh Karakteristik Usaha Kecil Terhadap Efisiensi Teknis Relatif (Survei Pada Industri Kecil Kerajinan Tapis Di Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2004)*. Laporan Hibah Penelitian Dosen Muda Dikti.
- Rifa'i, A., Aprilani, D., dan Prasetyo, S. 2007. *Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kemajuan Perekonomian Daerah Dengan Perkembangan Usaha Kecil (Survey Pada 10 Kab/Kota Di Provinsi Lampung Dengan Metode Panel Data Tahun 2000-2005)*. Laporan Hibah Penelitian Dosen Muda Dikti
- Snodgrass, D. R. and Biggs, T. 1996. *Industrialization and the Small Firm, Patterns and Policies*. International Centre for Economic Growth and Harvard Institute for International Development. Working Paper.

<http://www.amazon.com/Industrialization-Small-Firm-Patterns-Policies/dp/1558154558>

Tambunan, T.H. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta

Tambunan, T.H. 2005. *Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Faculty of Economic, University Trisakti Indonesia. Working Paper.

[http://depot.gdnet.org/newkb/fulltext/tambunan\\_sme.pdf](http://depot.gdnet.org/newkb/fulltext/tambunan_sme.pdf)

Tambunan, T.H. 2006. *Micro, Small And Medium Enterprises, Economic Growth And Poverty*. Faculty of Economics, University of Trisakti, Indonesia. Working Paper.

[www.topicsdevelopmentgateway.org/filedownload.do~itemId=1094049](http://www.topicsdevelopmentgateway.org/filedownload.do~itemId=1094049)